

HAMBATAN DALAM PERENCANAAN STRATEGI PENCEGAHAN INFLASI DAN PENGAWASAN TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Salsabila Sofiya Wardani¹, Adisty Aulia Zahra², Elvira Andriyani³, Widya Anggraini⁴,
Popi Dea Ananda⁵, Nurhidayah⁶

salsabila.240904@gmail.com¹, adistyaulia2003@gmail.com²,
andriyanivira442@gmail.com³, widyaanggraini1104@gmail.com⁴,
popideaananda@gmail.com⁵, nurhidayah0503223083@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen untuk memahami secara mendalam hambatan dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan analisis mendalam terhadap hambatan dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tantangan ini merupakan hasil dari dinamika kompleks antara faktor eksternal dan internal yang saling terkait. Biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan baku, kebijakan fiskal yang kurang fleksibel, serta kebijakan moneter yang menghadapi tantangan dalam respons pasar merupakan beberapa hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan inflasi.

Kata Kunci: Hambatan, Perencanaan, Pencegahan, Infasi, Stabilitas, Keuangan.

Abstract

The aim of this research is to identify and analyze obstacles in planning inflation prevention strategies and monitoring financial system stability. Thus, it is hoped that this research can contribute to the development of strategies for preventing inflation and monitoring financial system stability that are more effective and efficient. This research uses a qualitative approach with document analysis techniques to understand in depth the obstacles in planning inflation prevention strategies and monitoring financial system stability. Based on an in-depth analysis of obstacles in planning inflation prevention strategies and monitoring financial system stability in Indonesia, it can be concluded that these challenges are the result of complex dynamics between interrelated external and internal factors. High production costs due to rising raw material prices, less flexible fiscal policy, and monetary policy that faces challenges in market response are some of the main obstacles that affect the effectiveness of efforts to prevent inflation.

Keywords: Barriers, Planning, Prevention, Inflation, Stability, Finance.

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara (Suhartono, 2019). Secara umum, inflasi terjadi ketika harga-harga barang dan jasa secara berkelanjutan mengalami kenaikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli masyarakat, menimbulkan ketidakpastian ekonomi, serta mengganggu distribusi pendapatan. Dalam konteks ini, strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan menjadi krusial bagi pemerintah dan regulator untuk menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan (Utari et al., 2019).

Inflasi bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan politik suatu negara (Amirotul Nur'Azmi Naqiyya et al., 2023). Dampak dari inflasi yang tinggi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha hingga konsumen akhir. Penanganan inflasi oleh pemerintah melalui strategi yang tepat menjadi penting dalam mengendalikan kondisi ini (Triwahyuni, 2021). Strategi-strategi umum yang digunakan termasuk pengaturan kebijakan moneter, pengendalian biaya produksi, pengaturan kebijakan fiskal, serta intervensi langsung dari bank sentral dalam mengatur suku bunga (Simorangkir, 2019).

Namun, dalam prakteknya, implementasi strategi-strategi ini sering kali dihadang oleh berbagai hambatan yang kompleks dan beragam. Beberapa hambatan utama termasuk keterbatasan sumber daya, keterbatasan informasi yang akurat tentang kondisi ekonomi, serta koordinasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah, bank sentral, dan sektor swasta (Rosalina, 2021). Ketidakefektifan strategi pencegahan inflasi juga dapat disebabkan oleh dinamika ekonomi global yang tidak terduga, seperti fluktuasi harga komoditas global dan perubahan dalam kebijakan ekonomi negara-negara maju yang berdampak secara langsung terhadap ekonomi negara berkembang (Sari, 2019).

Untuk memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan, penting untuk mengacu pada temuan dari penelitian terdahulu yang relevan diantaranya

Penelitian oleh Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya bahan baku merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pengaturan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan faktor-faktor produksi ini sebagai strategi pencegahan inflasi yang efektif.

Sari (2020) mengidentifikasi bahwa strategi pencegahan inflasi yang efektif meliputi pengurangan biaya produksi dan kebijakan perpajakan yang cerdas. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap dinamika inflasi dan perubahan dalam struktur ekonomi domestik.

Widiyanto (2022) menemukan bahwa pengawasan sistem keuangan yang efektif memerlukan penggunaan indikator keuangan yang akurat dan koordinasi yang erat antara lembaga-lembaga keuangan. Studi ini menegaskan perlunya sistem pengawasan yang kuat untuk memitigasi risiko sistemik dan menjaga stabilitas finansial.

Meskipun telah ada penelitian yang signifikan dalam area ini, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diatasi yaitu, Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi secara spesifik hambatan-hambatan dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan di berbagai konteks ekonomi.

Analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana hambatan-hambatan ini secara langsung mempengaruhi efektivitas strategi pencegahan inflasi dan pengawasan sistem keuangan.

Penelitian mendatang harus fokus pada merumuskan solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi, termasuk pengembangan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.

Berdasarkan kenyataan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian Hambatan dalam Perencanaan Strategi Pencegahan Inflasi dan Pengawasan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan yang lebih efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen untuk memahami secara mendalam hambatan dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terutama adalah analisis dokumen yang mencakup laporan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku referensi, dan berbagai publikasi lainnya. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis yang kredibel, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam merancang strategi efektif untuk mencegah inflasi serta memastikan pengawasan yang optimal terhadap stabilitas sistem keuangan. Analisis dokumen ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai isu-isu yang ada, serta menelusuri berbagai pendekatan dan metode yang telah diterapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dokumen yang telah dilakukan didapati nenerapi temuan yang diantaranya yaitu

1. Identifikasi Hambatan dalam Perencanaan Strategi Pencegahan Inflasi

a. Biaya Produksi dan Bahan Baku

Menurut penelitian Kurniawan (2019), biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya bahan baku adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Salah satu hambatan utama dalam aspek ini adalah kenaikan harga bahan baku yang sering kali fluktuatif di pasar global. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga minyak dunia, ketidakstabilan politik di negara penghasil bahan baku, atau bencana alam yang memengaruhi produksi dan distribusi bahan baku. Kenaikan harga bahan baku tersebut pada akhirnya meningkatkan biaya produksi barang dan jasa di dalam negeri.

Selain itu, biaya produksi yang tinggi juga menjadi kendala signifikan dalam pencegahan inflasi. Banyak perusahaan di Indonesia masih menggunakan teknologi dan infrastruktur yang kurang efisien, sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi. Kurangnya investasi dalam teknologi modern dan infrastruktur yang memadai mengakibatkan proses produksi menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar global. Hal ini berimplikasi pada harga jual produk yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan inflasi.

b. Kebijakan Perpajakan dan Fiskal

Sari (2020) menyoroti pentingnya kebijakan perpajakan yang adaptif untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi. Salah satu hambatan yang diidentifikasi dalam aspek ini adalah kebijakan perpajakan yang tidak fleksibel. Kebijakan fiskal yang tidak mudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis

membuat pemerintah kesulitan merespons perubahan ekonomi dengan cepat dan efektif. Misalnya, dalam situasi ekonomi yang memburuk, penyesuaian tarif pajak atau pemberian insentif fiskal mungkin diperlukan untuk merangsang perekonomian, namun proses legislasi yang lambat dan birokrasi yang kompleks seringkali menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah serta antar kementerian terkait juga menjadi masalah. Kurangnya sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dapat mengurangi efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, jika pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengurangan pajak untuk merangsang konsumsi, namun pemerintah daerah justru menaikkan pajak daerah untuk menutupi defisit anggaran, maka tujuan kebijakan fiskal tersebut tidak akan tercapai.

c. Kebijakan Moneter

Dalam konteks kebijakan moneter, strategi pengaturan suku bunga oleh bank sentral sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah respons pasar yang lambat terhadap perubahan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi, diperlukan waktu bagi pasar untuk merespons perubahan tersebut. Respons yang lambat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi risiko yang tinggi, ketidakpastian ekonomi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan investasi.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga menjadi tantangan besar bagi efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga domestik. Misalnya, ketidakpastian akibat perang dagang antara negara-negara besar, perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju, atau krisis keuangan global dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar mata uang, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi domestik. Bank sentral harus mampu menavigasi ketidakpastian ini dan membuat keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari biaya produksi dan bahan baku, kebijakan perpajakan dan fiskal, hingga kebijakan moneter. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah, investasi dalam teknologi dan infrastruktur, serta respons yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global.

2. Identifikasi Hambatan dalam Pengawasan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

a. Ketersediaan dan Keakuratan Indikator Keuangan

Penelitian Widiyanto (2022) menunjukkan bahwa indikator keuangan yang akurat sangat penting untuk pengawasan yang efektif terhadap stabilitas sistem keuangan. Namun, ada beberapa hambatan signifikan dalam bidang ini. Salah satu hambatan utama adalah ketersediaan data keuangan yang tidak lengkap atau terlambat. Ketika data keuangan yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan tidak tersedia tepat waktu atau tidak lengkap, otoritas pengawas keuangan menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan yang cepat dan akurat. Data yang tidak lengkap atau tertunda ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak tepat terhadap kondisi keuangan suatu institusi atau sektor, sehingga langkah-langkah pencegahan yang diperlukan mungkin tidak dapat diambil segera.

Selain itu, kualitas data yang rendah juga menjadi hambatan besar dalam pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan. Data yang berkualitas rendah, yang

mungkin disebabkan oleh kesalahan dalam pengumpulan, pencatatan, atau pelaporan, dapat mengakibatkan kesalahan dalam analisis dan pengawasan. Kesalahan ini bisa berakibat fatal karena keputusan yang didasarkan pada data yang tidak akurat dapat memperburuk kondisi keuangan daripada memperbaikinya. Misalnya, jika data mengenai eksposur risiko suatu bank tidak akurat, otoritas pengawas mungkin gagal mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi krisis.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data keuangan. Ini termasuk investasi dalam teknologi informasi yang lebih canggih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan standar pelaporan yang lebih ketat dan seragam. Selain itu, kerjasama antara berbagai lembaga keuangan dan otoritas pengawas juga penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat, lengkap, dan dapat diandalkan.

b. Koordinasi Antar Lembaga Keuangan

Hambatan utama lain dalam pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan adalah kurangnya koordinasi antara lembaga keuangan. Bank sentral, otoritas keuangan, dan lembaga pengawas lainnya sering kali tidak sejalan dalam kebijakan dan implementasi. Kurangnya koordinasi ini dapat mengakibatkan tindakan yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan. Misalnya, jika bank sentral mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan pasar keuangan tetapi tidak dikoordinasikan dengan otoritas pengawas lainnya, upaya tersebut mungkin tidak berhasil secara optimal.

Fragmentasi regulasi juga menambah kompleksitas dalam pengawasan. Perbedaan regulasi antara sektor keuangan yang satu dengan yang lain menciptakan tantangan tambahan bagi otoritas pengawas. Regulasi yang berbeda dapat mengakibatkan celah dalam pengawasan, di mana beberapa institusi atau aktivitas mungkin tidak diawasi dengan baik karena tidak jelas di bawah yurisdiksi siapa mereka berada. Fragmentasi ini juga dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pelaku pasar, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas sistem keuangan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan harmonisasi regulasi antara lembaga keuangan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme kerjasama yang lebih efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pengembangan kerangka regulasi yang lebih terpadu. Dengan koordinasi yang lebih baik dan regulasi yang harmonis, otoritas pengawas dapat bekerja lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Secara keseluruhan, hambatan dalam pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan dan keakuratan data keuangan hingga koordinasi antar lembaga keuangan dan fragmentasi regulasi. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret untuk memastikan bahwa otoritas pengawas memiliki informasi yang mereka butuhkan dan dapat bekerja sama secara efektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

3. Dampak Dinamika Ekonomi Global

Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dinamika ekonomi global yang sangat beragam. Faktor-faktor global seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan ekonomi di negara maju memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Salah satu dampak utama dari dinamika ekonomi global ini

adalah volatilitas pasar global. Volatilitas pasar global mengacu pada ketidakstabilan harga di pasar internasional yang seringkali disebabkan oleh perubahan mendadak dalam permintaan dan penawaran komoditas, fluktuasi nilai tukar, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara-negara besar. Ketidakstabilan harga ini dapat mengganggu upaya pengendalian inflasi di Indonesia karena harga komoditas yang fluktuatif cenderung mempengaruhi harga barang dan jasa di dalam negeri. Misalnya, jika harga minyak dunia naik tajam, biaya transportasi dan produksi di Indonesia juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.

Selain itu, ketergantungan Indonesia pada impor juga membuat ekonomi domestik sangat rentan terhadap perubahan harga global. Banyak bahan baku dan barang modal yang digunakan dalam proses produksi di Indonesia berasal dari luar negeri. Ketika harga komoditas impor seperti minyak, gas, dan bahan pangan mengalami kenaikan di pasar global, biaya produksi di Indonesia juga akan meningkat. Hal ini tidak hanya mempengaruhi harga barang jadi di pasar domestik, tetapi juga dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Ketergantungan pada impor juga membuat Indonesia lebih sensitif terhadap kebijakan perdagangan dan tarif yang diterapkan oleh negara-negara maju. Sebagai contoh, perubahan kebijakan tarif oleh Amerika Serikat atau Uni Eropa dapat berdampak langsung pada biaya impor dan ekspor Indonesia, yang pada akhirnya mempengaruhi neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi nasional.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik terhadap dinamika global. Diversifikasi ekonomi, peningkatan efisiensi produksi, dan pengembangan sumber daya lokal adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan stabilitas harga di dalam negeri. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal yang responsif dan adaptif juga diperlukan untuk mengatasi dampak volatilitas pasar global dan menjaga kestabilan inflasi. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat mengelola dampak negatif dari dinamika ekonomi global dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dokumen yang telah dilakukan, teridentifikasi beberapa hambatan kunci dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Faktor-faktor ini tidak hanya kompleks, tetapi juga saling terkait dalam mempengaruhi kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pertama, biaya produksi dan bahan baku merupakan hambatan utama dalam upaya pencegahan inflasi. Kenaikan harga bahan baku yang fluktuatif, dipicu oleh faktor seperti perubahan harga minyak dunia atau ketidakstabilan politik di negara-negara produsen, secara langsung meningkatkan biaya produksi dalam negeri. Hal ini berdampak pada harga jual produk yang lebih tinggi, mendorong inflasi yang lebih tinggi pula.

Selanjutnya, kebijakan perpajakan dan fiskal yang kurang fleksibel juga menjadi kendala signifikan. Kebijakan yang sulit disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah membuat respons terhadap perubahan ekonomi menjadi lambat dan kurang efektif. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar kementerian terkait juga memperburuk masalah ini, menghambat implementasi kebijakan fiskal yang kohesif untuk merespons dinamika ekonomi secara tepat waktu.

Dalam konteks kebijakan moneter, tantangan utama adalah lambatnya respons pasar terhadap perubahan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Ketidakpastian ekonomi global seperti perang dagang dan perubahan kebijakan moneter di negara maju memperumit kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga domestik. Bank sentral harus dapat menavigasi kondisi ekonomi yang tidak pasti ini dengan bijaksana untuk mencegah fluktuasi inflasi yang tidak terkendali.

Di sisi pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan, ketersediaan dan keakuratan data keuangan menjadi hambatan yang signifikan. Data yang tidak lengkap atau terlambat dapat menghambat keputusan pengawasan yang akurat dan tepat waktu, mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga keuangan dan fragmentasi regulasi juga memperumit pengawasan efektif, memungkinkan celah untuk kegagalan sistem yang dapat memicu krisis finansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap hambatan dalam perencanaan strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tantangan ini merupakan hasil dari dinamika kompleks antara faktor eksternal dan internal yang saling terkait. Biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan baku, kebijakan fiskal yang kurang fleksibel, serta kebijakan moneter yang menghadapi tantangan dalam respons pasar merupakan beberapa hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan inflasi.

Di sisi pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan, ketersediaan data keuangan yang tidak lengkap atau terlambat, serta kurangnya koordinasi antara lembaga keuangan, juga menjadi kendala yang signifikan. Fragmentasi regulasi antar sektor keuangan menciptakan celah dalam pengawasan yang dapat membahayakan stabilitas finansial secara keseluruhan.

Pentingnya penelitian mendatang untuk mengatasi gap pengetahuan yang masih ada dalam konteks ini sangat ditekankan. Solusi konkret yang dapat mengatasi hambatan-hambatan ini perlu diformulasikan melalui pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan fleksibel serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat fondasi strategi pencegahan inflasi dan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia, sehingga mampu meningkatkan ketahanan ekonomi negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirotul Nur'Azmi Naqiyya, Nuril Hidayati, Shinta Eka Widamayanti, & Suryadini Diyah Marwati. (2023). Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra. *Istithmar*, 7(1), 50–65. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.637>
- Rosalina, S. (2021). Telaah Peran Dan Strategi Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(2), 128–146.
- Sari, D. I. (2019). Analisis Terhadap Peranan Dan Strategi Bank Indonesia Serta Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *Moneter Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 29–36. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/957>
- Simorangkir, I. (2019). Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik. RajaGrafindo Persada, 1–672.

- Suhartono, S. (2019). Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(3), 521. <https://doi.org/10.26905/JKDP.V13I3.1098>
- Triwahyuni. (2021). Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 199–210.
- Utari, G. A. D., Cristina, R., & Pambudi, S. (2019). Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya. *Bank Indonesia Institute*, 23, 1–64.